

## KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU TAHUN 2015 – 2019

Barika, email; barikaramli11@gmail.com  
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universita Bengkulu

Yusnida, email; yusnida@unib.ac.id  
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universita Bengkulu

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze The Poverty Characteristic in Bengkulu City. We use descriptive qualitative method according mixing data from Central Bureau of Statistics (BPS) and The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). This study found that the percentage of poor people in the city of Bengkulu during 2015-2019 decreased, as well as the poverty depth index (P1) and the poverty severity index (P2). The poverty line shows an increasing trend and in 2019 it will be IDR 660,442 per capita per month. The Selebar sub-district has the largest distribution of the number of poor people in the city of Bengkulu is in. The largest number of children attending school in the poor population group in a wide district, and the number of children attending school is greater than those who do not. The number of people over 15 years of age who do not work is more than those who work. The largest housing ownership status is self-owned with the main source of lighting from PLN electricity.*

**Key words:** Poverty, Poverty Gap Index, Poverty Severity Index, Poverty line, Poverty Characteristic.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu target *The Millenium Development Goals* (MDG's) adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*sustainable development goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

BPS, 2018 merilis bahwa selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018.

Provinsi Bengkulu merupakan propinsi yang memiliki prosentase jumlah penduduk miskin sebesar (15,41) persen pada tahun 2018. Prosentase ini lebih tinggi di dibandingkan angka prosentase jumlah penduduk miskin secara nasional yakni (9,66) persen. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tahun 2016 persentase jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu sebesar 20,72 persen dan wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi adalah kabupaten Kaur (22,36)persen. Secara umum di wilayah propinsi Bengkulu terjadi penurunan persentase penduduk miskin di mana pada tahun 2018 di kota Bengkulu persentase jumlah penduduk miskin turun menjadi (18,82) persen.

Di kota Bengkulu terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun masih memiliki tingkat ketimpangan pengeluaran yang tinggi. Berdasarkan data dan fenomena diatas menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian untuk menggali bagaimana karakteristik kemiskinan di kota Bengkulu. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakteristik Kemiskinan di kota Bengkulu.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Ellis (1983) *dalam* Darwin (2002), menyebutkan bahwa dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan ekonomi adalah kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ekonomi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum. Sedangkan kemiskinan relatif adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu.

Supriatna (1997) mengutarakan terdapat lima karakteristik penduduk miskin yakni

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b. Peluang untuk memiliki asset produksi secara mandiri tidak ada.
- c. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- d. Rata-rata atau kebanyakan tidak mempunyai fasilitas.
- e. Relatif berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa *'development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy'*.

Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan "*a poor country is a poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

BPS mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Hasil penelitian Damrul Ahmad (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat di artikan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan kausalitas. Kedua, kemiskinan

mempengaruhi tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat diartikan antara kemiskinan dan tingkat pendidikan hanya memiliki hubungan satu arah. Ketiga, ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat pendidikan, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga dapat disimpulkan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah.

Rini dan Sugiharti (2016), menyatakan bahwa pada tahun 2012 melalui analisis pemetaan kemiskinan maka terdapat empat kuadran kemiskinan. pada kuadran satu terdiri dari Provinsi Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Kuadran dua terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, NTB, dan NTT. kuadran tiga terdiri dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kuadran empat yakni provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Nurwanti (2008) meneliti Kemiskinan melalui Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan menemukan hasil bahwa Tingkat kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 1999-2006 cenderung terus mengalami peningkatan, pada tahun 2006 tingkat kemiskinan masih jauh lebih tinggi dari apa yang ditargetkan dalam MDGs. Bentuk-bentuk kebijakan dan program yang ada masih dirasakan kurang efektif mengatasi kemiskinan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dirumuskan melalui berbagai persiapan dan pentahapan. Ada lima faktor yang diketahui berkorelasi dengan kemiskinan di Indonesia, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur serta lokasi geografis. Perhatian pada faktor-faktor tersebut saat melakukan perumusan kebijakan akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di setiap wilayah.

Spaho (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of poverty in Albania* mengemukakan bahwa variabel yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga adalah ukuran dan tempat tinggal rumah tangga. Dikarenakan jumlah penduduk miskin meningkat di daerah perkotaan dan pedesaan maka diperlukan upaya pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan karakteristik sosial dan demografi rumah tangga. Untuk mengurangi kemiskinan, maka harus memperhatikan peningkatan kepada sektor manufaktur, pertanian dan pariwisata.

Banks (2017) melakukan tinjauan sistematis tentang kemiskinan dan ketidakmampuan Negara berpendapatan rendah hingga Sedang. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara disabilitas dan kemiskinan. Hubungan antara ketidakmampuan dan kemiskinan ini tetap ada berdasarkan jenis kelamin, ukuran tipe kemiskinan yang digunakan dan penurunan nilai. Hubungan positif akan meningkat dengan meningkatnya

tingkat pendapatan, dengan 59% dari pendapatan rendah, 67% dari pendapatan menengah ke bawah dan 72% dari pendapatan menengah ke atas.

Islam (2017) dalam penelitian yang berjudul *Impact on poverty and income inequality in Malaysia's economic growth* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Namun, Pertumbuhan ekonomi saja mampu menjelaskan perubahan kemiskinan. Pola pertumbuhan merupakan hal yang penting dalam menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sektor manufaktur merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi insiden kemiskinan di Malaysia.

Ogwumike (2013) meneliti *Determinants of Poverty among Farming Households in Nigeria*. Hasil penelitiannya menunjukkan Faktor penentu kemiskinan antara lain karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, aset fisik dan lokasi tempat tinggal/zona geopolitik. Temuan utama dari studi ini meliputi: pendapatan petani berbanding terbalik dengan status kemiskinan rumah tangga; dimana jika terjadi peningkatan pendapatan satu persen dari kegiatan pertanian akan mengurangi probabilitas rumah tangga petani menjadi miskin sebesar 16 persen. Langkah - langkah untuk mengurangi kemiskinan di antara rumah tangga pertanian di Nigeria harus ditujukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil produksi. Penyediaan infrastruktur dasar di daerah pedesaan khususnya merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Akses fasilitas kredit oleh petani dapat ditingkatkan melalui koperasi daerah pedesaan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Nazir (2005) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang . Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004). Data yang akan dikumpulkan meliputi data tingkat kemiskinan, data garis kemiskinan, data kedalaman kemiskinan, data keparahan kemiskinan, data jumlah penduduk miskin dan data-data yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan(TNP2K). Data yang digunakan adalah data yang mengacu pada hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

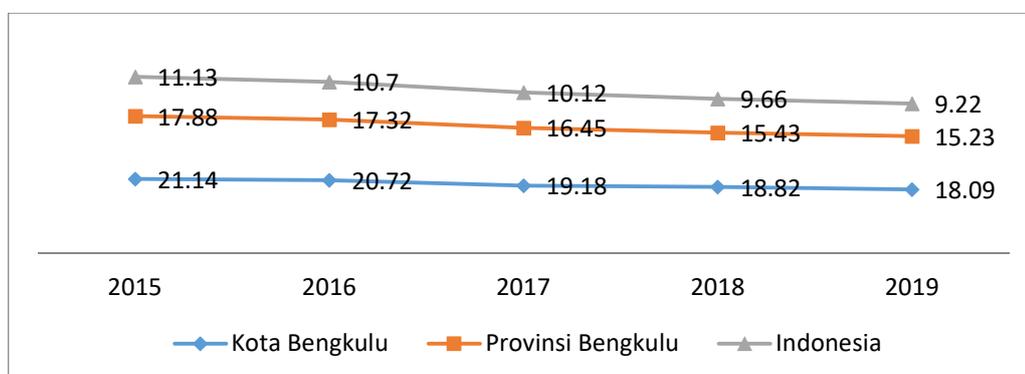
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Sudjana (2001) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Kasiram (2008) menyatakan penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Perhitungan dan Interpretasi Data**

**Persentase jumlah penduduk Miskin**

Persentase jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 11,13 persen dan turun menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu masih di atas tingkat kemiskinan provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi ke tujuh di Indonesia. Sedangkan di Sumatera merupakan provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah provinsi Aceh.



Sumber data: bps.go.id

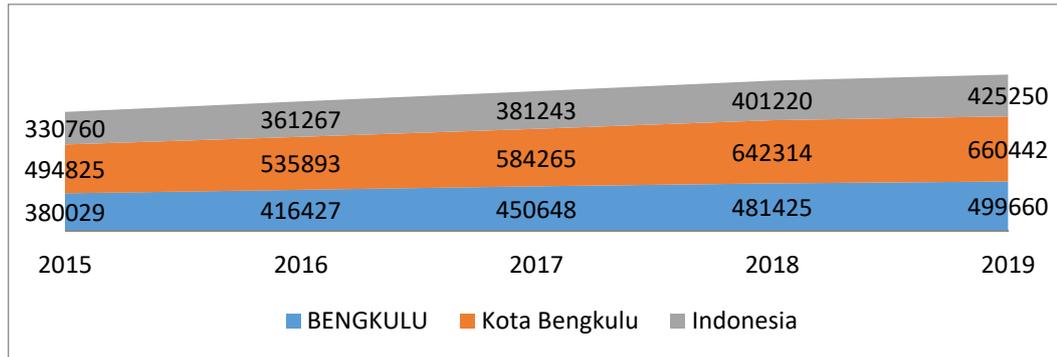
**Gambar 1. Persentase penduduk miskin di kota Bengkulu, provinsi Bengkulu dan Indonesia tahun 2015-2019.**

Persentase jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu di atas persentase jumlah penduduk miskin provinsi dan Nasional. Persentase jumlah penduduk miskin Kota Bengkulu berada pada urutan ke-empat setelah kabupaten Seluma, Kaur dan Bengkulu Selatan. Pada tahun 2014 persentase jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu sebesar 21,14 persen dan menurun hingga tahun 2019 menjadi 18,09 persen. Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu sejalan dengan

penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu sebanyak 17,88 persen menurun menjadi 15,23 persen pada tahun 2019.

**Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan diartikan sebagai suatu kemampuan yang dapat dicapai oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Kebutuhan hidup dasar terdiri dari kebutuhan untuk melakukan konsumsi makanan dan bukan makanan.

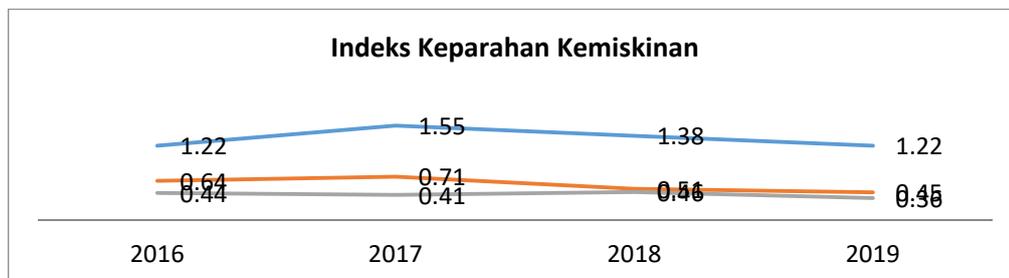


Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.

**Gambar 2. Angka garis kemiskinan Indonesia, provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu tahun 2015-2019.**

Angka garis kemiskinan Indonesia, provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu tahun 2015-2019. Secara nasional pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp.330.760,- perkapita perbulan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi Rp.425.250,0 perkapita perbulan. Di provinsi Bengkulu pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp.380.029,029 perkapita perbulan dan di kota Bengkulu sebesar Rp.494.825,- perkapita perbulan. Adapun pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.499.660,- di provinsi Bengkulu dan Rp.660.442,-. Penduduk yang memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.

**Gambar 3. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.**

Mengetahui indeks kedalaman kemiskinan bertujuan untuk melihat sejauh mana kesenjangan pengeluaran penduduk miskin jika dibandingkan dengan garis kemiskinan. Angka indeks yang semakin meningkat mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Di kota Bengkulu tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan nilainya semakin meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni dari 4,11 menjadi 4,69. Pada tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan menjadi turun hingga tahun 2019. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak hanya terjadi di kota Bengkulu. Di provinsi Bengkulu dan nasional juga terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat.

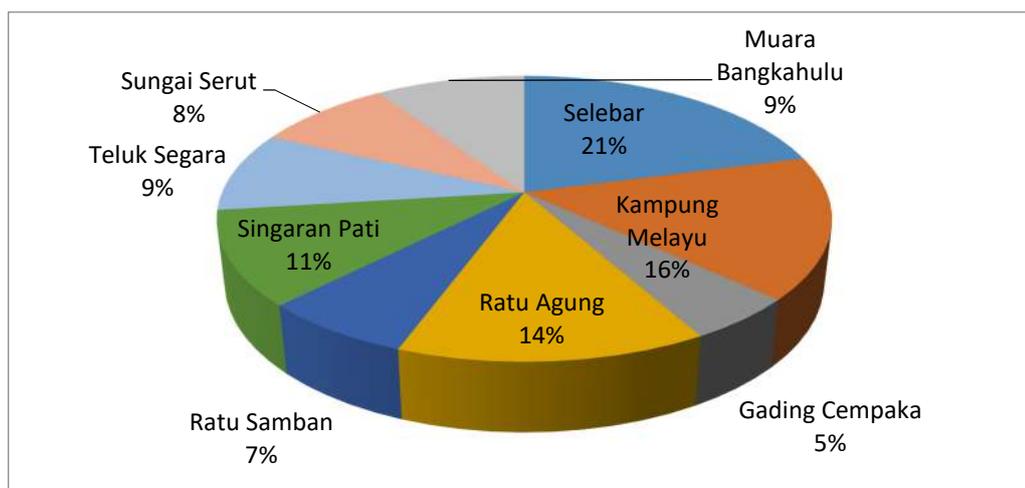
Adapun indeks keparahan kemiskinan menunjukkan ukuran seberapa timpang pengeluaran antara penduduk miskin. Indeks yang semakin tinggi berarti ketimpangannya semakin tinggi pula. Dari gambar 5.5 diketahui bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin kota Bengkulu lebih tinggi dari ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Bengkulu. Tahun 2017 ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin adalah yang tertinggi dan semakin menurun hingga tahun 2019. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin rendah.

### **Karakteristik masyarakat miskin di kota Bengkulu**

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membagi kelompok rumah tangga/individu miskin dalam 4 kelompok status kesejahteraan rendah. Desil 1 merupakan kelompok Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Desil 2 merupakan kelompok Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan di atas 10%-20% terendah di Indonesia. Desil 3 merupakan kelompok Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan di atas 20%-30% terendah di Indonesia dan desil 4 merupakan kelompok Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan di atas 30%-40% terendah di Indonesia. Data yang digunakan mengacu pada hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

### **Sebaran rumah tangga miskin di kota Bengkulu**

Kota Bengkulu secara administrative terdiri dari 9 kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin di kota Bengkulu tersebar di 9 kecamatan yakni kecamatan Selebar, kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, kecamatan Ratu Agung, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Singaran Pati, kecamatan Teluk Segara, kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Muara Bangkahulu. Jumlah rumah tangga miskin tersebar di kota Bengkulu di 9 kecamatan.



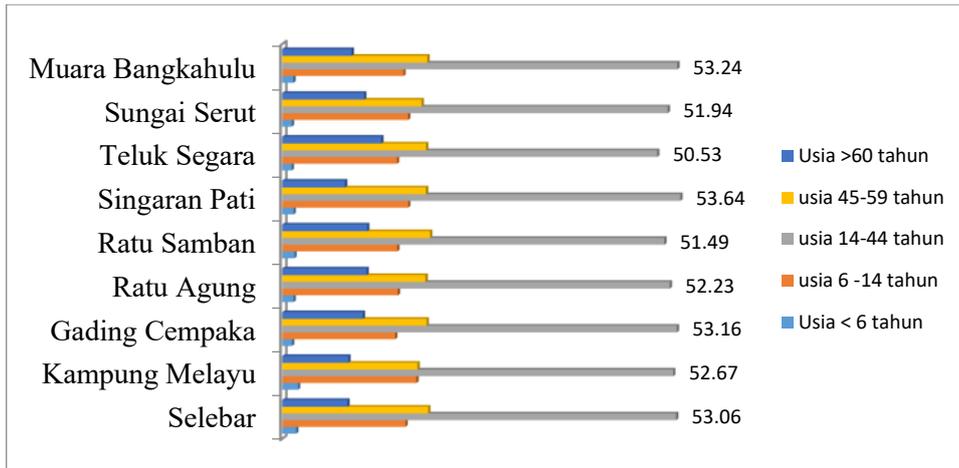
Sumber: Pengolahan data sekunder tahun 2020.

**Gambar 4. Persentase Sebaran Rumah Tangga miskin di kota Bengkulu dengan status tingkat kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia.**

Kecamatan yang memiliki persentase jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah kecamatan Selebar. Di kecamatan selebar sebaran jumlah rumah tangga miskin terdiri dari 19,95% pada desil 1\*, sebanyak 23,20% pada desil 2\*, sebesar 23,11 persen pada desil 3\* dan 24,86% Pada desil 4\*. Di kecamatan Kampung Melayu sebaran jumlah rumah tangga miskin sebesar 16 persen, di kecamatan Ratu Agung 14 persen, kecamatan Singaran Pati 11 persen, di kecamatan Teluk Segara dan Muara Bangkahulu masing-masing 9 persen dan terendah di kecamatan Gading Cempaka sebesar 5 persen.

#### **Sebaran Individu miskin berdasarkan kelompok usia**

Berdasarkan kelompok usia, sebaran individu miskin di kota Bengkulu terbagi dalam 5 kelompok utama. Penduduk kelompok usia kurang dari 6 tahun, persentase tertinggi adalah kecamatan Selebar (23,88%) dan terendah di kecamatan Gading Cempaka (4,03%). Pada kelompok usia 6-14 tahun selain kecamatan Selebar, di kecamatan Kampung Melayu sebaran penduduk miskin tergolong tinggi yakni 17,64%. Penduduk miskin pada kelompok usia 14-44 tahun persentase terbesar ada di kecamatan Selebar sebesar 21,20 % dan terendah di kecamatan Gading Cempaka sebesar 5,08%. Di atas usia 45 tahun sebaran Penduduk miskin terbesar ada di kecamatan Selebar, kecamatan Kampung Melayu dan kecamatan Ratu Agung.



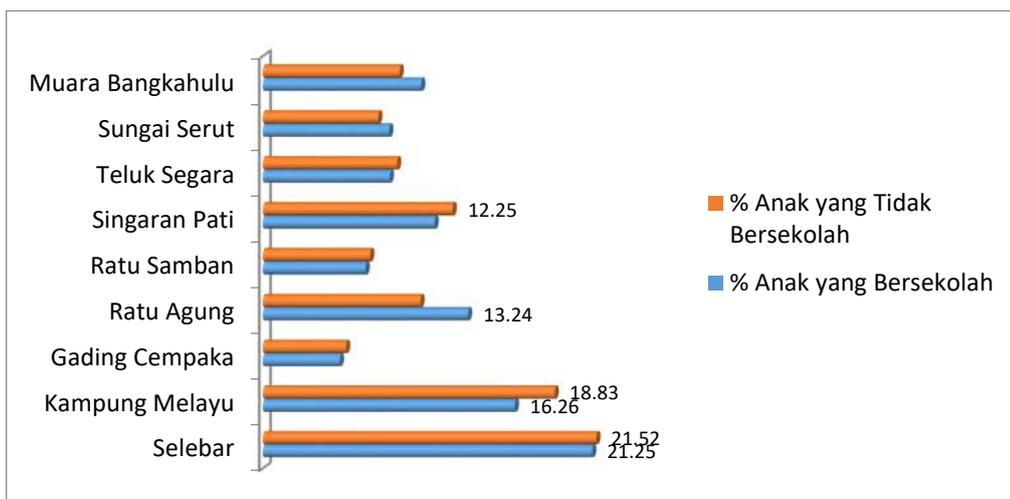
Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2020.

**Gambar 5. Persentase penduduk miskin berdasarkan kecamatan dan kelompok usia.**

Jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu di atas 50 persen pada rentang usia 14-44 tahun. Kecamatan kampung Melayu dan kecamatan Singaran Pati memiliki persentase terbesar pada kelompok usia ini. Persentase penduduk usia kurang dari 6 tahun dan lebih dari 60 tahun terbanyak ada di kecamatan teluk Segara dan terendah di kecamatan Singaran Pati

**Persentase anak yang bersekolah dan tidak bersekolah pada keluarga miskin di kota Bengkulu.**

Dari sisi pendisipan anak pada penduduk miskin di kota Bengkulu, Anak usia sekolah yakni berusia 7-18 tahun. Meskipun berada pada status kesejahteraan rendah/miskin, kesadaran orang tua akan pendidikan bagi anak cukup tinggi, yakni sebanyak 85 persen anak bersekolah dan sisanya 15 persen tidak bersekolah.



Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.

**Gambar 6. Persentase anak yang bersekolah dan tidak bersekolah pada kelompok penduduk miskin di kota Bengkulu.**

Total jumlah anak yang bersekolah pada kelompok penduduk miskin di kota Bengkulu sejumlah 12.999 anak, yang terbagi dalam 3 kelompok sekolah. Kecamatan Selebar sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak memberikan sebaran terbesar pada jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah. Meskipun secara rata-rata persentase anak bersekolah lebih tinggi dari persentase anak tidak bersekolah, di kota Bengkulu terdapat enam kecamatan yang sebaran anak tidak bersekolah lebih besar dibandingkan sebaran anak bersekolah. Hanya di kecamatan Ratu Agung, kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Muara Bangkahulu yang memiliki jumlah anak bersekolah lebih besar dibandingkan yang tidak bersekolah.

**Tabel 1.**

Persentase pendidikan anak bersekolah pada keluarga miskin per kecamatan di Kota Bengkulu.

	Usia 7-12 tahun (SD)	Usia 13-15 tahun (SMP)	Usia 16-18 tahun (SMA)
Selebar	19.08	38.56	42.36
Kampung Melayu	19.16	39.69	41.15
Gading Cempaka	18.34	38.83	42.37
Ratu Agung	21.09	37.48	41.43
Ratu Samban	15.43	43.85	40.72
Singaran Pati	17.90	40.18	41.92
Teluk Segara	17.37	39.53	43.10
Sungai Serut	19.53	41.51	38.96
Muara Bangkahulu	20.11	36.37	43.52

Sumber: Pengolahan data sekunder tahun 2020

**Persentase individu yang bekerja dan tidak bekerja pada kelompok penduduk miskin di Kota Bengkulu.**

Pekerjaan atau status bekerja merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan secara absolut. Dengan adanya pekerjaan maka akan menghasilkan pendapatan bagi individu untuk memenuhi pengeluarannya.

**Tabel 2.**

Persentase Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok umur dan kecamatan di kota Bengkulu.

Kecamatan	% Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun		% Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun		% Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas	
	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja
Selebar	26.53	21.02	20.05	22.19	18.98	17.84
Kampung Melayu	12.24	17.06	16.31	15.56	14.97	13.74

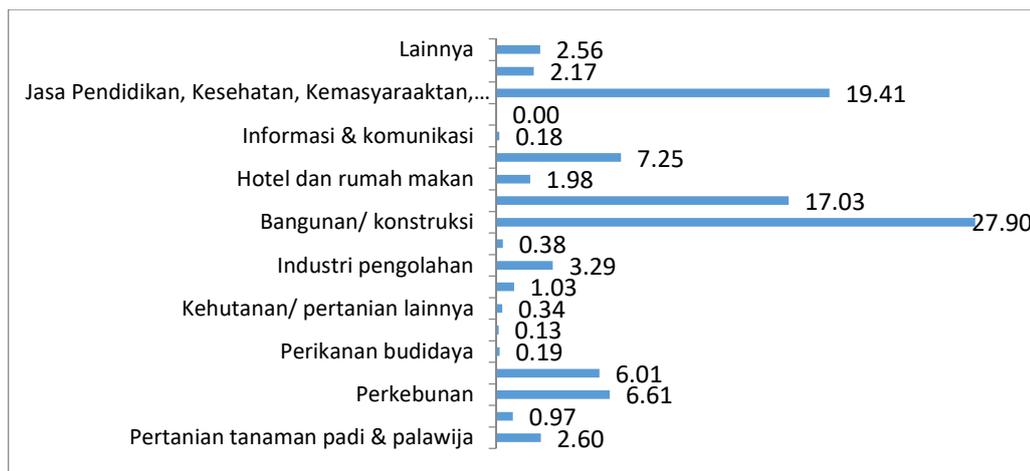
Kecamatan	% Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun		% Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun		% Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas	
	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja
Gading Cempaka	2.04	5.08	4.70	5.41	5.21	5.71
Ratu Agung	4.08	12.86	13.29	13.62	14.43	16.27
Ratu Samban	12.24	6.58	7.52	6.14	7.55	8.00
Singaran Pati	14.29	11.42	10.69	11.02	10.09	8.12
Teluk Segara	8.16	8.04	9.56	8.10	12.45	11.57
Sungai Serut	8.16	8.14	7.96	8.15	8.06	9.93
Muara Bangkahulu	12.24	9.80	9.92	9.81	8.26	9.91

Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.

Di Kota Bengkulu, untuk penduduk miskin yang berusia 5-14 tahun rata-rata tidak bekerja. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga dan individu miskin terbanyak. Di kecamatan Selebar sebaran penduduk yang berusia 5-14 tahun yang bekerja (26,53%) lebih besar dibandingkan sebaran yang tidak bekerja (21,02%). Setelah kecamatan Selebar, kecamatan yang memiliki sebaran jumlah penduduk usia 5-14 tahun yang bekerja kedua adalah kecamatan Singaran Pati (14,29%) dan kecamatan Gading Cempaka memiliki sebaran terendah yakni 2,04%.

Adapun untuk kelompok usia produktif (15-59) tahun didapatkan hasil bahwa proporsi individu yang tidak bekerja masih lebih tinggi dibandingkan yang bekerja. Secara rata-rata di kota Bengkulu persentase penduduk miskin yang tidak bekerja pada usia 15-59 tahun sebesar 55,88 persen dan sisanya 44,12 persen yang bekerja. Sebaran penduduk miskin yang tidak bekerja antara lain terbesar di kecamatan Selebar (22,19%) lebih besar dibandingkan yang bekerja yakni 20,06%. Terdapat empat kecamatan yang persentase sebaran penduduk miskinnya lebih besar dibandingkan yang tidak bekerja. Ketiga kecamatan tersebut adalah kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Teluk Segara dan kecamatan Muara Bangkahulu.

Ditinjau dari sisi lapangan pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga terbagi dalam 19 sektor lapangan usaha. Sector bangunan dan kontruksi merupakan penyerapan lapangan pekerjaan terbesar yakni 27,90 persen. Selanjutnya adalah sector Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan sebesar 19,41 persen, sector perdagangan sebesar 17,03 persen. Sector yang memiliki sebaran terendah adalah sector peternakan (0,13%), sector informasi dan komunikasi (0,18%) bahkan tidak ada yang bekerja di sector keuangan dan asuransi.



Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.

**Gambar 8. Persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di kota Bengkulu.**

**Persentase status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati penduduk miskin di kota Bengkulu.**

Rumah atau bangunan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh rumah tangga miskin di kota Bengkulu dilihat dari status kepemilikan terbagi atas milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya.

**Tabel 3.**

Persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan bangunan tempat tinggal di kota Bengkulu.

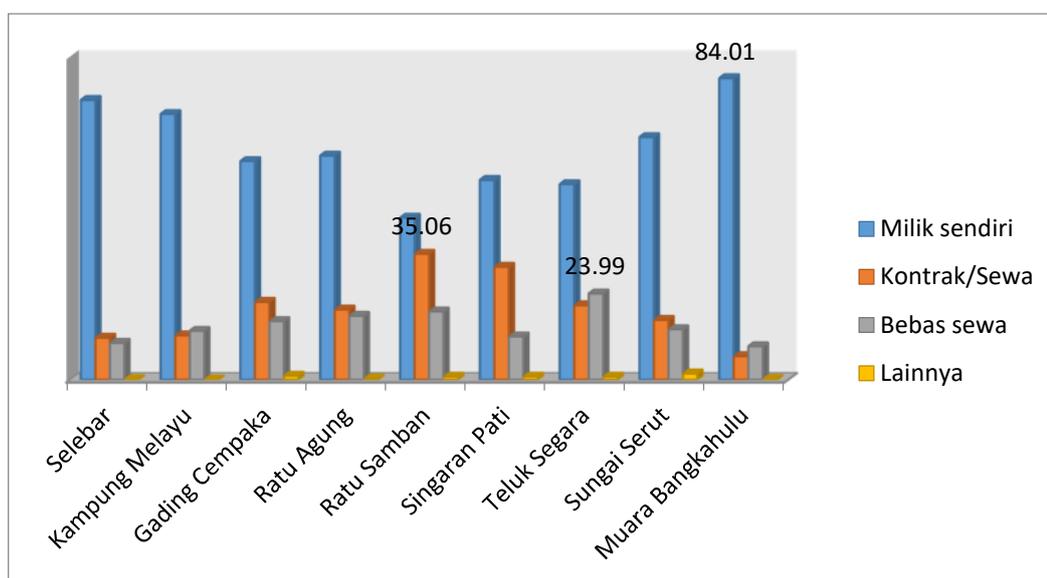
Kecamatan	Jumlah rumah tangga			
	Milik sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas sewa	Lainnya
Selebar	24.17	13.71	14.87	5.00
Kampung Melayu	17.62	11.12	15.15	1.00
Gading Cempaka	4.51	6.07	5.66	11.00
Ratu Agung	12.73	15.04	16.97	7.00
Ratu Samban	4.55	13.37	8.97	11.00
Singaran Pati	8.77	18.74	8.87	18.00
Teluk Segara	7.34	10.55	15.12	15.00
Sungai Serut	8.51	7.93	8.28	29.00
Muara Bangkahulu	11.80	3.47	6.11	3.00

Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.

Total rumah tangga miskin di kota Bengkulu yang tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri adalah 13.397 atau 67,30 persen. Rumah tangga miskin yang menempati rumah sewa/kontrak sebanyak 3.544 atau 17,80 persen, menempati rumah bebas sewa sebanyak 2.864 atau 14,39

persen dan sisanya sebanyak 0,50 persen menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya.

Pada tabel 3 diketahui bahwa rumah tangga miskin yang tinggal menempati rumah milik sendiri terbanyak adalah di kecamatan Selebar yakni sebesar 24,11 persen sedangkan paling sedikit adalah di kecamatan Ratu Samban sebanyak 4,55 persen. Rumah tangga miskin yang tinggal di rumah yang dikontrak/ menyewa terbanyak berada di kecamatan Singaran Pati sebesar 18,74 persen dan paling sedikit tersebar di kecamatan Muara Bangkahulu 3,47 persen. Adapun rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan bebas sewa terbanyak di kecamatan Ratu Agung (16,97%) dan terendah di kecamatan Gading Cempaka (5,66%) sedangkan rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya terbanyak di kecamatan Sungai Serut (29%).



Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.

**Gambar 9. Persentase kepemilikan rumah per kecamatan di kota Bengkulu.**

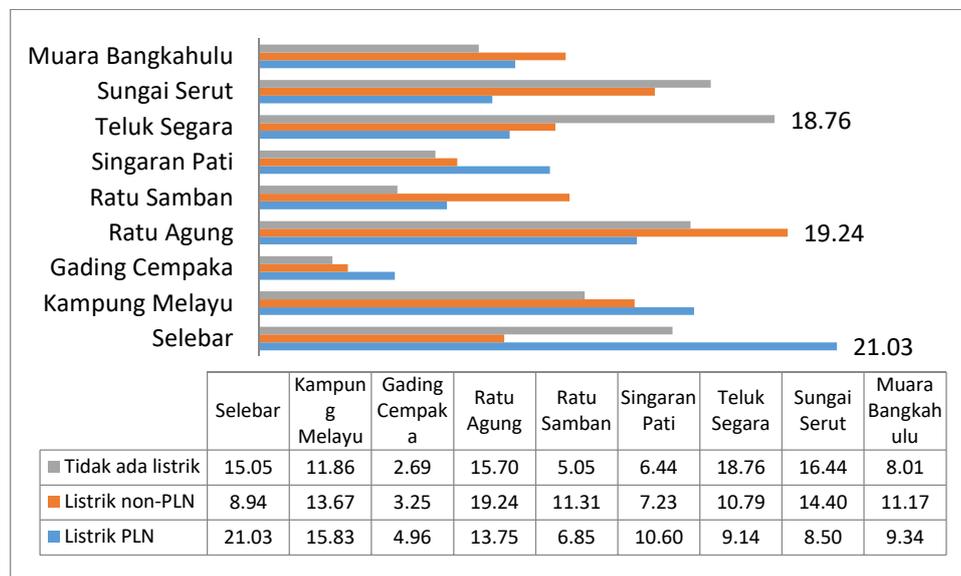
**Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama penduduk miskin di kota Bengkulu.**

Sarana penerangan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan akan penerangan diatur oleh pemerintah melalui monopoli PLN. Meskipun begitu pada kenyataannya di kota Bengkulu masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum menggunakan sarana penerangan dari pemerintah terutama rumah tangga/penduduk miskin.

Penggunaan sarana penerangan terbagi atas penggunaan Listrik PLN, penggunaan listrik non PLN dan tidak menggunakan listrik. Secara keseluruhan masyarakat miskin di kota Bengkulu yang menggunakan

(Jurnal Ilmu Ekonomi)

Listrik PLN sebanyak 71.42 persen, menggunakan listrik non PLN sebanyak 20,76 persen dan sisanya sebanyak 7,82 persen belum menggunakan listrik.



Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.

**Gambar 10. Sebaran penggunaan sarana penerangan rumah tangga miskin di kota Bengkulu.**

Sebaran penggunaan listrik PLN terbanyak yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di kota Bengkulu adalah di kecamatan Selebar (21,03%) dan yang paling sedikit menggunakan listrik PLN adalah kecamatan Gading Cempaka (4,96%). Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN terbanyak di kecamatan Ratu Agung (19,24%) dan paling sedikit di kecamatan Gading Cempaka (3,25%). Persentase total rumah tangga miskin yang tidak ada listrik tergolong sedikit (7,82%) tersebar di seluruh kecamatan di kota Bengkulu. Kecamatan Teluk segara merupakan wilayah yang rumah tangga miskinnya paling banyak tidak ada listrik (18,76%) dan selanjutnya adalah kecamatan Sungai Serut (16,44%).

**Pembahasan**

Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2015-2019 menunjukkan adanya trend penurunan meskipun karena adanya pandemic covid-19 diprediksi akan ada kenaikan persentase kemiskinan di tahun 2020. Dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia, pemerintah sukses mengurangi jumlah penduduk miskin yang semula berjumlah 28.513.570 jiwa pada September 2015 menjadi 24.785.870 jiwa pada September 2019. Angka kemiskinan di perkotaan sebesar 39,77 persen dan kemiskinan di perdesaan sebesar 60,23 persen. Tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu tahun 2019 merupakan peringkat ke 7 setelah provinsi Aceh dan merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar kedua setelah provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu tersebar di 9

kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 2019 wilayah di provinsi Bengkulu yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan provinsi adalah kabupaten Seluma, kabupaten Kaur, kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Tingkat kemiskinan di kota Bengkulu merupakan empat besar di wilayah provinsi Bengkulu. Tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan penduduk Indonesia meningkat selama lima tahun terakhir, secara nasional garis kemiskinan tahun 2019 adalah sebesar Rp.425.250,- perkapita perbulan. Adapun garis kemiskinan provinsi Bengkulu adalah Rp.499.660,- perkapita perbulan dan di kota Bengkulu sebesar Rp.660.442,-perkapita perbulan. Dengan jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 4 orang maka pendapatan rumah tangga perbulan adalah Rp.2.641.770,- perbulan, nominal pendapatan ini masih di atas UMP yakni Rp.2.040.000,-. Penduduk kota Bengkulu yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan terkategori sebagai penduduk miskin. Pendapatan perkapita perbulan akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan akan makanan dan non makanan.

BPS menyatakan bahwa pengeluaran akan komoditas makanan merupakan porsi terbesar 73,89 persen bila dibandingkan dengan komoditas non makanan. Komoditas non makanan (26,11%) terdiri atas pengeluaran perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kedalaman kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh kesenjangan pengeluaran dengan garis kemiskinan dan semakin indeks kedalam kemiskinan mendekati nol (0) maka semakin tidak senjang tingkat pengeluaran dengan garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di kota Bengkulu pada lima tahun terakhir tertinggi di tahun 2017 dan terendah adalah tahun 2019. Selain itu pada tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan juga yang tertinggi selama lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2017 adalah kondisi dimana ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin sebesar 1,55.

Penduduk miskin di kota Bengkulu tersebar di Sembilan kecamatan. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Basis Data terpadu, penduduk miskin dinyatakan sebagai penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia. Adapun sebaran penduduk miskin di kota Bengkulu terbanyak adalah di kecamatan Selebar. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma dan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar (30,56%) dari total luas kota Bengkulu. Keadaan penduduk di kecamatan Selebar adalah yang terendah di kota Bengkulu. Sebagaimana besar penduduk kecamatan Selebar bermata pencarian petani sesuai dengan geografis wilayahnya yang bukan merupakan wilayah pesisir.

Sebaran penduduk miskin terbesar kedua adalah di kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Kampung Melayu merupakan wilayah pemekaran dari kecamatan Selebar. Kecamatan Kampung Melayu merupakan wilayah pesisir yang mana mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan buruh bangunan serta sector informal lainnya. Kecamatan yang memiliki sebaran penduduk miskin terbanyak ketiga adalah kecamatan Ratu Agung yang pusat kecamatannya berada di kelurahan Nusa Indah. Sebagian wilayah kecamatan Ratu Agung merupakan wilayah pesisir yakni kelurahan Lempuing, kelurahan Nusa Indah dan kelurahan Tanah patah. Kecamatan yang memiliki sebaran jumlah penduduk miskin terendah adalah kecamatan Gading Cempaka. Sebagai kecamatan yang terletak di tengah pusat kota Bengkulu ketersediaan sarana dan prasarana social dan ekonomi yang lengkap menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat/sebaran penduduk miskin di wilayah ini. Sejalan dengan sebaran persentase jumlah penduduk miskin, jumlah rumah tangga miskin terbanyak berada di kecamatan Selebar, Kampung Melayu, Ratu Agung dan Singaran pati.

Ditinjau dari sisi kelompok usia, jumlah individu miskin di kota Bengkulu sebaran terbesar adalah di kecamatan Selebar, kecamatan kampung Melayu dan kecamatan Ratu Agung. Kelompok usia dibagi dalam 5 kategori yakni berusia <6 tahun, usia 6-14 tahun, usia 14-44 tahun, usia 45-59 tahun dan usia lebih dari 60 tahun. Bila dilihat dari angka dependency ratio diketahui bahwa proporsi dari penduduk miskin berusia produktif lebih besar dari usia tanggungan. Persentase usia 14-59 tahun sebesar 71,80 persen, sedangkan persentase anak di bawah usia 14 tahun sebesar 18,15 persen.

Peningkatan pendidikan merupakan salah satu karakteristik dan upaya pengentasan kemiskinan. di kota Bengkulu jumlah anak yang bersekolah sejumlah 12.999 anak yang menempuh pendidikan dasar. Sebaran anak bersekolah terbagi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesadaran orang tua akan pendidikan anak cukup tinggi yakni 85 persen. Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka anak bersekolah pada kelompok masyarakat miskin. selain itu ketersediaan sarana pendidikan seperti sekolah dan madrasah menyebabkan persentase anak bersekolah pada kelompok penduduk miskin. di kecamatan Selebar terdapat 14 SD dan 5 madrasah ibtidaiah, terdapat 5 SMP dan 1 madrasah Tsanawiah serta terdapat 2 SMA dan 1 MA yang menunjang kesempatan anak bersekolah.

Karakteristik kemiskinan selanjutnya adalah status bekerja atau tidak bekerjanya penduduk/individu. Keadaan dalam kondisi yang miskin menyebabkan masih ada anak-anak yang terpaksa harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Penduduk yang berusia 5-14 tahun yang bekerja adalah sebanyak 49 orang yang sebaran paling tinggi berada di kecamatan Selebar. Meskipun demikian proporsi anak tidak bekerja di usia

ini cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja anak rendah.

Adapun pada rentang usia 15-59 tahun proporsi penduduk yang tidak bekerja lebih besar dibandingkan yang bekerja. Keadaan ini dapat memicu semakin tingginya angka kemiskinan dikarenakan tidak adanya pendapatan dari bekerja. Pada kelompok usia di atas 60 tahun di kecamatan Gading Cempaka, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Ratu Agung, kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Muara Bangkahulu persentase penduduk miskin yang tidak bekerja lebih besar dibandingkan penduduk miskin yang bekerja. Di kecamatan Selebar pekerjaan sebagai buruh bangunan dan konstruksi, perkebunan, perdagangan, jasa pendidikan kesehatan masyarakat dan pemerintahan memberikan kontribusi sebesar 78 persen pada sector/lapangan usaha penduduk miskin. Sedangkan pada kecamatan Kampong Melayu, lapangan pekerjaan yang paling banyak dilakoni oleh penduduk miskin adalah perikanan tangkap, bangunan dan konstruksi, perdagangan, jasa pendidikan kesehatan masyarakat dan pemerintahan.

Perumahan atau rumah yang layak merupakan salah satu indikator kategori hidup layak. Menurut BPS kriteria rumah tangga miskin dari sudut perumahan antara lain adalah luas lantai bangunan kurang dari 8m<sup>2</sup> per individu, lantai rumah masih terbuat dari tanah atau bambu dan atau kayu berkualitas rendah dengan fasilitas yang minimal. Dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangga miskin di kota Bengkulu terbagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah rumah milik sendiri (60,70%). Sebaran kepemilikan rumah milik sendiri di kecamatan Selebar adalah yang tertinggi dan terendah di kecamatan Gading Cempaka. Secara persentase per kecamatan, kecamatan Ratu Samban memiliki persentase kepemilikan rumah milik sendiri paling rendah dan kepemilikan rumah milik sendiri tertinggi di kecamatan Muara Bangkahulu. Kecamatan Ratu Samban merupakan wilayah yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan memiliki jumlah prasarana ekonomi yang mampu menampung tenaga kerja dari luar mengakibatkan persentase penduduk miskin yang hidup dengan bangunan rumah dengan status kontrak/sewa adalah paling tinggi di kota Bengkulu. Pada kelompok kepemilikan rumah bebas sewa tertinggi adalah di kecamatan Teluk Segara.

Sarana penerangan yang digunakan oleh rumah tangga di kota Bengkulu antara lain penggunaan Listrik PLN, penggunaan listrik non PLN dan tidak ada listrik. Pelanggan listrik PLN terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019, semakin bertambahnya pemukiman maka kebutuhan akan listrik semakin bertambah. Penduduk miskin di kota Bengkulu yang belum menggunakan listrik terbanyak berada di kecamatan Teluk Segara, jika dikaitkan dengan sebaran kepemilikan rumah,, di kecamatan Teluk Segara kepemilikan rumah dengan status bebas sewa adalah sebaran tertinggi dari penduduk miskin. bangunan yang bersifat bebas sewa termasuk di dalamnya

adalah menumpang. Rumah yang bukan milik sendiri merupakan salah satu penyebab tingginya persentase tidak menggunakan listrik. Adapun kecamatan yang menggunakan listrik non PLN yang terbesar di kecamatan adalah kecamatan Ratu Agung. Listrik non PLN berasal dari penggunaan aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Persentase penduduk miskin di kota Bengkulu selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan, demikian juga dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Garis kemiskinan menunjukkan trend yang meningkat dan pada tahun 2019 menjadi Rp.660.442,- perkapita perbulan. Kecamatan yang memiliki sebaran jumlah penduduk miskin terbesar di kota Bengkulu adalah di kecamatan Selebar dan kecamatan dengan sebaran penduduk miskin terendah adalah kecamatan Gading Cempaka. Jumlah anak bersekolah pada kelompok penduduk miskin terbesar di kecamatan selebar dan terendah di kecamatan Gading Cempaka, dan jumlah anak bersekolah lebih banyak dibandingkan yang tidak bersekolah. Jumlah individu berusia di atas 15 tahun yang tidak bekerja lebih banyak dibandingkan yang bekerja. Status kepemilikan perumahan terbesar adalah milik sendiri dengan sumber penerangan utama dari listrik PLN

### **KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

Tingkat kemiskinan di kota Bengkulu di atas persentase penduduk miskin nasional dan provinsi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya atau program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Wilayah yang memiliki sebaran penduduk miskin tinggi yakni kecamatan selebar yang merupakan wilayah pada perbatasan dengan kabupaten, disarankan pemerintah mampu meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi, social dan kesehatan di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder, penelitian lanjutan dengan menggunakan data primer dapat dilaksanakan untuk menganalisa kemiskinan di kota Bengkulu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Bengkulu Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statustik. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.
- Banks. Lena Morgon. Hannah Kuper. and Sarah Polack. 2017. "Poverty and Disability in Low-And Middleincome Countries: A Systematic Review." *PLoS ONE* 12(12):1–19.
- Damrul Ahmad. Mike Triani. 2018. "Analisis Kausalitas Antara Kemiskinan. Ketimpangan Pendapatan Dan Tingkat Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal EcoGen* 1(3).
- Islam. Rabiul. Ahmad Bashawir Abdul Ghani. Irwanshah Zainal Abidin. and Jeya Malar Rayaiappan. 2017. "Impact on Poverty and Income Inequality

(Jurnal Ilmu Ekonomi)

in Malaysia's Economic Growth." *Problems and Perspectives in Management* 15(1):55–62.

Kasiram. Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang. Malang: UIN Malang Press.

Kuncoro. Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi. Perencanaan. Dstrategi. Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Nazir. Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.

Nurwati. N. 2008. "Kemiskinan: Model Pengukuran. Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan." *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10(1):245387.

Ogwumike. F. O. and M. K. Akinnibosun. 2013. "Determinants of Poverty among Farming Households in Nigeria." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4(2):365–73.

Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rini. Ayu Setyo and Lilik Sugiharti. 2017. "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 1(2):17–33.

Purta Nugraha Dian. 2020. K3miskinan di Kota Bengkulu, Apa Penyebabnya?

*JIEP-Vol. 20, No 1, Maret 2020 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851*

Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional. Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Provinsi SumateraUtara*. Pustaka Bangsa Press.

Spaho. Alma. 2014. "Determinants of Poverty in Albania." *Journal of Educational and Social Research* (April 2014).

Sudjana. 2001. *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.

Supriatna. Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Todaro. Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. edited by Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

TNP2K.2020. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.